



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 06 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5	BELANJA	1.887.164.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.887.164.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	649.640.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan	649.640.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	649.640.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	271.370.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 23 . 05	Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik	271.370.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	230.870.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 79	Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan	966.154.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 79 . 01	Koordinasi Pelaksanaan Dokumentasi dan Publikasi	449.954.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 79 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	111.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 79 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	299.875.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 79 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	38.879.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 79 . 02	Koordinasi Kehumasan	396.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 79 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	120.820.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 79 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	272.380.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 79 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 79 . 03	Koordinasi Pelayanan Protokoler	120.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 79 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 79 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.600.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.887.164.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
<div>Tanjung, 30 Desember 2015 PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA</div> <div>H. ASHARI, SH.MH</div>			